

---

## Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) Menuju Terwujudnya Keluarga Berkualitas (Studi Kasus Pada Kampung KB Rampak Polah Desa Langensari)

Laras Rahmawati<sup>1</sup>, Tina Cahya Mulyatin<sup>2</sup>, Riza Purnama<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> STISIP Bina Putera Banjar, Indonesia

Email: [rizapurnama06@gmail.com](mailto:rizapurnama06@gmail.com)

Received: January 31, 2025

Revised: February 23, 2024

Accepted: February 24, 2025

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung KB di Desa Langensari serta partisipasi dari masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan teori menurut George C. Edward (Subarsono (2005)) yang menyatakan bahwa terdapat empat model dalam menganalisis implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Kampung KB Rampak Polah Desa Langensari. Hal yang menjadi pertimbangan memilih Kampung KB Desa Langensari sebagai fokus penelitian adalah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Rampak Polah, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Jawa Barat yang berhasil memasuki tahapan verifikasi lapangan bagi 10 besar nominasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan menggunakan metode Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Untuk menunjang data primer kemudian peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber literatur, dokumen, dan atikel yang relevan dengan penelitian ini. Pada hasil penelitian, secara umum implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Langensari berjalan dengan baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang teridentifikasi dalam beberapa program seperti hanya ada beberapa program yang terjalani di satu desa saja serta partisipasi dari masyarakat yang masih belum optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Publik, Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

### Abstract

*This research aims to find out how the Implementation of the KB Village Program in Langensari Village and the participation of the local community. This study uses the theory according to George C. Edward (Subarsono (2005)) which states that there are four models in analyzing policy implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research was conducted in the Rampak Polah KB Village in Langensari Village. The reason for choosing Langensari Village KB Village as the focus of research is that Rampak Polah Family Quality (KB) Village, Langensari Village, Langensari Subdistrict, Banjar City is the only representative from West Java Province who successfully entered the field verification stage for the top 10 nominees for the Best KB Village at the National Level in 2023. In this study, the determination of informants was carried out using the Purposive Sampling and Snowball Sampling methods. To support primary data, researchers then used secondary data derived from literature sources, documents, and articles relevant to this research. In the research results, in general, the implementation of the*

*Quality Family Village Program (KB) policy in Langensari Village is going well. However, there are some weaknesses or shortcomings identified in some programs such as there are only a few programs running in one village.*

**Keywords:** *Implementation, Public Policy, Family Quality Village (KB)*

## **PENDAHULUAN**

Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Rampak Polah, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Jawa Barat yang berhasil memasuki tahapan verifikasi lapangan bagi 10 besar nominasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023. Hasil pengamatan dan fakta di wilayah Desa Langensari Kecamatan Langensari dihadapkan kepada faktor internal dan eksternal dalam Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berkualitas, berbagai indikasi permasalahan.

Pertama, belum meratanya program di setiap dusun. Seperti Program Bina Keluarga Remaja (BKR), Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan juga Program Usaha Peningkatan Peran Keluarga Akif (UPPKA) yang hanya ada pada satu dusun. Kedua, Sumber daya manusia yang belum mumpuni dan kurangnya kerjasama lintas sektoral. Hal ini dibuktikan bahwa dari enam belas anggota kelompok kerja (pokja) hanya delapan orang yang telah menerima pelatihan dan sosialisasi pengelolaan Kampung KB. Kemudian hal tersebut berimbas pada permasalahan pertama dimana ada beberapa program yang belum terlaksana di beberapa dusun di Desa Langensari. Terakhir, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang cukup banyak terjadi di Desa Langensari yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga perselingkuhan,

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Dan Didukung Aspek Teoritis Yang Ada Penulis Tertarik Untuk Melakukan Kajian Ilmiah Melalui Fokus Penelitian “Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) Menuju Terwujudnya Keluarga Berkualitas” Di Desa Langensari Kecamatan Langensari. Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Implementasi Program. Kampung KB di Desa Langensari. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini adalah; Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi kebijakan program Kampung KB di Desa Langensari Kecamatan Langensari serta mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB di desa Langensari.

## **LANDASAN TEORI**

George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Pada dasarnya banyak para ahli yang memberikan definisi tentang kebijakan publik. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Di sisi lain pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Ilmu Pemerintahan mengkaji mengenai kebijakan, sebab kebijakan sangat penting guna menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang ada dan menentukan kearah mana pemerintahan dan masyarakatnya akan dibawa.

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah “sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta”. Maksud partisipasi di sini adalah keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Wazir (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan suatu gejala sosial yang ada. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan objek penelitian yang tengah berlangsung pada saat studi ataupun sebelumnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting).

### **Informasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjar. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu sesuai dengan kepentingan penelitian dalam rangka menjangkau informasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langensari. Hal yang menjadi pertimbangan memilih Kecamatan Langensari adalah dengan diraihnya penghargaan program kampung KB Rampak Polah tetapi masih adanya masalah yang perlu ditindaklanjuti yang membuat peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan menggunakan metode Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Menurut Sugiono Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan yang memiliki kapasitas sesuai dengan kriteria tertentu yang telah diterapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik

penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

### **Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat kualitatif maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah :

1. Wawancara Mendalam

Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan secara langsung, dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan/atau mendiskusikan sesuatu yang menjadi masalah terkait penelitian ini.

2. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini peneliti menganut sistem kepastakaan terbuka dimana peneliti akan mengumpulkan data atau informasi lebih lanjut melalui bahan bacaan terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan sistem kepastakaan terbuka ini peneliti berharap bisa mendapatkan teori dalam pembahasan masalah dan melengkapi data yang berhubungan terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Dengan dokumen ini peneliti dapat memperoleh data serta demografi penduduk, guna memenuhi kelengkapan penulisan penelitian tentang gambaran umum wilayah objek penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan kualitatif model interaktif atau model sajian terjalin. Model ini memiliki tiga komponen utama yaitu reduksi data, peyajian data, dan penarikan data serta verifikasi data. Reduksi data merupakan proses pengeleminasian data yang kurang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan maksud agar hasil penelitian lebih terfokus dan memiliki batasan. Proses ini dilakukan sejak awal penelitian ketika data sudah didapatkan hingga hasil penelitian sudah terakumulasi secara total. Selanjutnya ketika data sudah teroganisir, maka dapat disajikan dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Dimana narasi yang telah disusun menggunakan pertimbangan logika peneliti yang didalam narasinya terdapat kalimat, skema, jaringan kerja, ataupun tabel pendukung jika diperlukan. Pada penyajian data ini peneliti akan mengelompokkan informan sehingga informasi yang diketahui berdasarkan pokok masalah dan sumber. Sajian data dilakukan untuk memahami bagaimana studi pola perilaku pemilih pemula dan dampak yang ditimbulkan. Semua data yang telah berkumpul akan dirancang untuk menyampaikan informasi yang lebih sistematis mengenai Implementasi Kebijakan Kampung KB Untuk terwujudnya Keluarga Berkualitas.

Setelah semua data terkumpul secara total maka langkah selanjutnya peneliti bisa menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara aktivitas pengulangan (review) dengan tujuan pematapan data. Kemudian penelusuran data kembali dengan cepat untuk meninjau kemungkinan yang akan terjadi pada saat penelitian waktu menulis sajian data, dengan melihat kembali pada catatan lapangan, berdiskusi baik dengan

rekan mahasiswa lainnya, dosen pembimbing ataupun tokoh serta acuannya untuk mengembangkan konsensus antar subjektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Kampung KB**

Geogre C Edward III dalam Subarsono (2005) bahwa salah satu variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kominikasi yang berarti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### **1. Komunikasi**

Untuk mempertahankan konsistensi dalam melakukan program kampung kb, pokja kampung KB Rampak Polah dengan tekun mengatur pertemuan setiap satu bulan sekali untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program Kampung KB. Pertemuan ini menjadi tonggak penting bagi kami untuk menyelaraskan langkah-langkah yang akan diambil, mengevaluasi pencapaian, dan merencanakan tindak lanjut yang diperlukan. Anggaran dana BOKB dari kota dan ADD dari desa menjadi pendorong utama bagi kelancaran program

ini, memungkinkan pokja untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan poja kampung KB. Pokja Kampung KB berdiskusi, merumuskan strategi, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil sesuai dengan visi dan misi program Kampung KB. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada upaya individu, tetapi juga pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan adanya pertemuan Pokja ini, untuk memastikan bahwa pokja tetap berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Kampung KB.

#### **2. Sumber Daya**

Selain Komunikasi, sumber daya merupakan salah satu dimensi dalam pengimplementasian kebijakan. Sumber daya yang ideal untuk implementasi program Kampung KB harus mencakup berbagai aspek yang mendukung kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Dalam menilai sumber daya Program Kampung KB, PLKB Kampung KB Rampak Polah fokus utamanya ada pada kompetensi dan kemampuan para kader. PLKB memahami bahwa kualitas kader sangat menentukan keberhasilan program ini. Oleh karena itu, selalu dilakukannya evaluasi terhadap kompetensi kader secara berkala. Jika ditemukan kekurangan dalam kemampuan atau pengetahuan mereka, PLKB mengambil langkah untuk memperbaiki situasi tersebut.

#### **3. Disposisi**

Dalam Program Kampung KB, disposisi mengacu pada berbagai keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak terkait, baik itu pemerintah daerah, kader Kampung KB, maupun masyarakat secara umum, untuk mendukung dan melaksanakan program tersebut.

Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan Program Kampung KB. Ini termasuk alokasi sumber daya, dukungan kebijakan, serta penentuan

prioritas program dalam agenda pembangunan daerah. Kader Kampung KB memegang peran penting dalam menggerakkan program ini di tingkat lokal. Disposisi kader meliputi komitmen untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memfasilitasi layanan KB, serta berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dalam pelaksanaan Program Kampung KB, terkadang kita menghadapi tantangan atau permasalahan yang memerlukan penyelesaian segera. Ketika hal ini terjadi, pendekatan yang diambil adalah dengan segera mengadakan rapat bersama-sama dengan kepala desa, anggota Pokja Kampung KB, dan mitra kerja lainnya.

Rapat ini menjadi forum untuk mendiskusikan permasalahan yang muncul secara terbuka dan menyeluruh. Menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi, menganalisis akar penyebabnya, dan mengidentifikasi solusi yang mungkin. Setiap pihak memberikan masukan dan pendapatnya, sehingga dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Melalui diskusi yang konstruktif dan kolaboratif, akan didapat kesepakatan tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang dihasilkan dapat berupa rencana tindakan konkret, alokasi sumber daya tambahan, atau perubahan dalam strategi pelaksanaan program.

#### **4. Struktur Organisasi**

Dimensi lainnya adalah Struktur Organisasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Struktur organisasi dalam Program Kelompok Kampung KB biasanya terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terkoordinasi untuk melaksanakan program dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam menjalankan Program Kampung KB, semua proses dan tugas yang harus dilakukan telah tertuang dengan jelas dalam Surat Keputusan (SK) yang telah disepakati. SK ini menjadi pedoman utama bagi seluruh anggota Pokja Kampung KB dalam melaksanakan berbagai kegiatan program.

Setiap langkah, prosedur, dan tanggung jawab telah dijelaskan secara rinci dalam SK tersebut. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, semuanya telah diatur dengan baik dalam dokumen resmi ini. Ini membantu memastikan bahwa semua anggota Pokja memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Selain SK, juga ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri yang menjadi panduan praktis dalam pelaksanaan setiap kegiatan program. SOP ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang harus diikuti, tata cara pelaksanaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.

#### **Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung KB**

Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. Masyarakat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan

Program Kampung KB. Melalui forum-forum partisipatif seperti musyawarah desa atau kelurahan, masyarakat memberikan masukan, aspirasi, dan kebutuhan mereka terkait program ini. Partisipasi ini memastikan bahwa program yang dirancang mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi pelaku dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Program Kampung KB. Mereka terlibat dalam menyebarkan informasi, mengorganisir acara penyuluhan, serta menyediakan layanan kesehatan reproduksi kepada sesama anggota masyarakat. Tetapi disamping itu masih ada masyarakat yang kadang tidak paham terkait program kampung KB. Ketidapahaman masyarakat terhadap Program Kampung KB merupakan tantangan yang nyata.

Dalam banyak kasus, kurangnya pengetahuan tentang program tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya informasi yang disampaikan secara efektif, rendahnya tingkat literasi kesehatan, atau kurangnya aksesibilitas informasi. Ketidakpedulian atau tidak tertarik ini sering kali merupakan hasil dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya perencanaan keluarga dan dampak positifnya terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Mungkin diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengedukasi dan mengajak mereka yang tidak berperan aktif ini agar turut serta dalam program Kampung KB Rampak Polah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komunitas

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Menuju Terwujudnya Keluarga Berkualitas di Desa Langensari, Kecamatan Langensari maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada hasil penelitian, secara umum implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Langensari berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan telah dikelola dengan cukup efektif dalam memfasilitasi pelaksanaan program. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang teridentifikasi dalam beberapa program seperti hanya ada beberapa program yang terjalani di satu desa saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam aspek-aspek tertentu dari implementasi kebijakan. Perbaikan yang tepat dapat membantu meningkatkan efektivitas dan dampak program secara keseluruhan.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa masih ada masyarakat yang kurang mengenal program ini karena minimnya informasi yang artinya partisipasi masyarakat masih belum tinggi untuk Program Kampung KB. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan proses program tersebut. Dengan memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, serta meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Langensari memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih besar dalam mencapai tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solihin. (1997). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Kedua
- Abdullah, Syukur. (1988). Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan. Ujung Pandang: Persadi
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung.
- Andi, Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Publik. Jakarta : Rineka Cipta Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
- BKKBN. (2015). Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Cetakan ke 5. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( Edisi Kedua, Cetakan Kelima). Gadjadara University : Yogyakarta.
- Ekowati, Lilik Roro Mas. 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program ( Suatu Kajian Teoritis dan Praktis ). Pustaka Cakra : Surakarta.
- Ekowati, Lilik Roro Mas. 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan
- Faisal, Sanapiah. (2010). Format- Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gronroos, Christian. 1990. Service Management and Marketing : Managing the Moment of Trust in Service Competition. Toronto : Lexington Books
- Gulo, W. (2002). Metode Penelitian. Jakarta: PT Grasindo Hamalik, Oemar. (2007). Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- H. A. S. Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Handoko. 2003. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Hartanto, Hanafi. (2004). Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Jakarta: Mandar Maju
- Irwan, Irmawati. 2009. Implementasi Kebijakan Sisduk Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Takalar. Tesis. Program Pascasarjana – Unhas. Makassar.
- Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr. Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mardawani. (2020). Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Mutiarin, D. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Nazir, Moh. (1988). Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soetjipto. (1992). Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Semarang: Satya Wacana Press
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo
- Prastowo Program ( Suatu Kajian Teoritis dan Praktis ). Pustaka Cakra : Surakarta.
- Rachmadi, F. 1994. Public Relation Dalam Teori dan Praktek. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta: Erlangga
- Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Surmayadi, Nyoman. I. (2005). Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2011). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media
- Syamsuni, H. (2019). Statistik dan Metodologi Penelitian Dengan Implementasi Pembelajaran Android. Margomulyo: Karya Bakti Makmur
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. S. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset. 2003.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tanjung, Adrian dan Bambang Subagio, Panduan Praktis Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah, (Yogyakarta: Total Media, 2012
- Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. <http://dppk.malangkota.go.id/>
- Ariani, Desa. (2018). “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Skripsi. Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suryana, Siti Erna Latifi. (2009). “Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang”. Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Syawal, Jumadi. (2019). “Implementasi Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu”. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

- Rahman HM & Indrawadi, Junaedi. (2019). Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Civic Education*, Vol 2 No 4.
- Restiyani, Ni Luh Novi & Yasa, Igusti Wayan Murjana. (2019). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Denpasar. *E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 8 No 7.